



Kemendikdasmen

**Laporan Kinerja Triwulan I
BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta
Tahun 2026**

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta selama Triwulan I tahun 2026.

A. Progress Capaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan I		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen						
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	Persen	92.8	0.04	0	Rp3.224.233.000	Rp1.325.154.652
DI.7605.QDB.750 Satuan PAUD, Dikdas, Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	7296	292	876	Rp3.224.233.000	Rp1.325.154.652
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	Persen	100	0	0	Rp413.766.000	Rp73.798.592
DI.7605.QDB.751 Pemda yang Mendapatkan Pendampingan Penerapan SPM Pendidikan	Lembaga	6	0	1	Rp413.766.000	Rp73.798.592
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta						
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan kategori sangat baik	Kategori	Sangat Baik	-	-	Rp18.251.474.000	Rp10.504.195.327

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

Sasaran/Indikator/RO	Satuan	Target Tahunan	Triwulan I		Anggaran	
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi
WA.7606.EBA.994 Layanan Perkantoran	Layanan	1	0	0	Rp18.251.474.000	Rp10.504.195.327
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta minimal A	Predikat	AA	-	-	Rp191.173.000	Rp178.610.500
WA.7606.EBA.956 Layanan BMN	Dokumen	1	0	0	Rp7.500.000	Rp7.150.000
WA.7606.EBA.962 Layanan Umum	Layanan	1	0	0	Rp183.673.000	Rp171.460.500

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Sosialisasi regulasi SPMB kepada Pemda dan Pemangku Kepentingan 24 25 Feb
2. Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas di UPT 3,4 Maret
3. Pendampingan pemda dalam pelaksanaan SPMB 12 Maret

Progress/Kegiatan

1. Sosialisasi Regulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan (24-25 Februari 2026)

Kegiatan sosialisasi regulasi SPMB telah dilaksanakan pada tanggal 24-25 Februari 2026 di Hotel Grand Rohan dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas pendidikan, satuan pendidikan, serta pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dan meningkatkan pemahaman terhadap kebijakan, regulasi, serta mekanisme pelaksanaan SPMB. Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh informasi yang komprehensif mengenai ketentuan terbaru SPMB sehingga diharapkan mampu mendukung pelaksanaan penerimaan murid baru yang objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

2. Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas di UPT (3-4 Maret 2026)

Pada tanggal 3-4 Maret 2026 telah dilaksanakan koordinasi pelaksanaan program prioritas bersama Unit Pelaksana Teknis (Konsolidasi Daerah Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2026) di Hotel Alana Yogyakarta. Kegiatan ini difokuskan pada penyelarasan rencana kerja, pembagian peran dan tanggung jawab, serta identifikasi dukungan yang diperlukan dalam pelaksanaan program prioritas kementerian. Hasil koordinasi menunjukkan adanya kesepahaman antarunit dalam pelaksanaan program serta komitmen untuk

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

memperkuat sinergi dan kolaborasi guna memastikan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

3. Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPMB (12 Maret 2026) di BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta)

BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan pendampingan kepada pemerintah daerah pada tanggal 12 Maret 2026 di BPMP Prov. D.I. Yogyakarta dalam rangka mendukung implementasi SPMB. Pendampingan dilakukan melalui konsultasi teknis, pembahasan permasalahan yang dihadapi daerah, serta pemberian rekomendasi penyelesaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam melaksanakan SPMB secara efektif, meningkatkan kualitas tata kelola penerimaan murid baru, serta meminimalkan potensi kendala dalam pelaksanaannya.

Kendala/Permasalahan

1. Sosialisasi Regulasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) kepada Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan

- Masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman peserta terhadap substansi regulasi SPMB, terutama terkait implementasi teknis pada tingkat daerah dan satuan pendidikan.
- Adanya perubahan kebijakan dan ketentuan pelaksanaan yang memerlukan penyesuaian serta sosialisasi lanjutan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Keterbatasan waktu pelaksanaan sosialisasi menyebabkan belum seluruh pertanyaan dan isu teknis dapat dibahas secara mendalam.
- Belum meratanya kapasitas sumber daya manusia di daerah dalam memahami dan menerjemahkan regulasi ke dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

2. Koordinasi Pelaksanaan Program Prioritas di UPT

- Terdapat perbedaan tingkat kesiapan dan kapasitas masing-masing UPT dalam mendukung implementasi program prioritas.
- Belum optimalnya sinkronisasi data dan informasi antarunit yang diperlukan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program.
- Adanya perbedaan interpretasi terhadap target, indikator kinerja, dan mekanisme pelaksanaan program sehingga memerlukan penyelarasan lebih lanjut.
- Keterbatasan waktu koordinasi menyebabkan beberapa isu strategis memerlukan pembahasan lanjutan secara lebih mendalam.

3. Pendampingan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan SPMB

- Terdapat beragam karakteristik dan kondisi daerah yang menyebabkan implementasi kebijakan memerlukan penyesuaian tanpa mengurangi kepatuhan terhadap regulasi.
- Masih muncul pertanyaan dan kebutuhan klarifikasi terkait penerapan jalur penerimaan, kuota, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan SPMB.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Penguatan diseminasi dan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan pemahaman yang seragam terhadap regulasi SPMB.
2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi data antara BPMP, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penguatan kapasitas SDM daerah dalam pengelolaan dan pengawasan pelaksanaan SPMB.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi potensi kendala serta memastikan pelaksanaan SPMB berjalan sesuai prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Rencana Kegiatan/Aktivitas

-

Progress/Kegiatan

Tidak ada kegiatan yang mendukung IKK 1.2 yang dilaksanakan di triwulan 1

Kendala/Permasalahan

Masih menunggu petunjuk teknis dari pusat

Strategi/Tindak Lanjut

Terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan eselon 1

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta dengan kategori sangat baik

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Perencanaan Program dan Anggaran 26 Februari

Progress/Kegiatan

BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran pada tanggal 26 Februari 2026 di Hotel New Saphir sebagai bagian dari upaya memastikan keterpaduan antara perencanaan kinerja, program, kegiatan, dan alokasi anggaran. Kegiatan ini diikuti oleh unsur pimpinan, koordinator tim kerja, serta pengelola perencanaan dan keuangan. Fokus kegiatan meliputi penelaahan target kinerja, penyelarasan program dan kegiatan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta identifikasi kebutuhan sumber daya untuk mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Selain itu, dilakukan pembahasan terhadap prioritas program, efektivitas penggunaan anggaran, serta mitigasi potensi kendala dalam pelaksanaan kegiatan tahun berjalan. Melalui kegiatan ini telah dihasilkan kesepahaman mengenai arah kebijakan, prioritas program, dan strategi pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Kegiatan juga memperkuat sinergi antarunit kerja dalam mendukung pencapaian target kinerja BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Capaian Sementara

1. Terlaksananya rapat koordinasi perencanaan program dan anggaran yang melibatkan seluruh tim kerja terkait.
2. Tersusunnya rancangan program dan kegiatan yang selaras dengan program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.
3. Teridentifikasinya kebutuhan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

4. Terlaksananya penyelarasan antara target kinerja, indikator kinerja, dan alokasi anggaran pada tim kerja.
5. Tersusunnya usulan perbaikan dan penyempurnaan dokumen perencanaan berdasarkan hasil pembahasan bersama.
6. Meningkatnya pemahaman dan komitmen tim kerja dalam menerapkan prinsip perencanaan dan penganggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel.
7. Tersedianya bahan tindak lanjut sebagai dasar finalisasi dokumen perencanaan program dan anggaran serta pelaksanaan monitoring pencapaian target kinerja.

Kendala/Permasalahan

1. Masih terdapat usulan kegiatan yang belum sepenuhnya selaras dengan prioritas program dan target kinerja organisasi sehingga memerlukan penyesuaian lebih lanjut.
2. Ketersediaan data dan informasi pendukung perencanaan dari beberapa tim kerja belum lengkap dan belum terintegrasi secara optimal.
3. Adanya perubahan kebijakan dan prioritas program dari tingkat pusat yang memerlukan penyesuaian terhadap rencana kegiatan dan alokasi anggaran.
4. Belum optimalnya keterkaitan antara indikator kinerja, target capaian, dan kebutuhan anggaran pada beberapa kegiatan.
5. Keterbatasan waktu dalam proses pembahasan menyebabkan beberapa usulan program dan kegiatan memerlukan pendalaman serta verifikasi lanjutan.
6. Masih diperlukan penguatan koordinasi lintas tim kerja untuk memastikan sinkronisasi antara perencanaan program, penganggaran, dan manajemen risiko.
7. Perlunya peningkatan kapasitas pengelola program dan anggaran dalam penyusunan perencanaan berbasis kinerja dan hasil (result-based planning).

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan berdasarkan hasil pembahasan dan masukan unit kerja.
2. Melengkapi data dukung dan eviden yang diperlukan dalam proses perencanaan dan penganggaran.
3. Melakukan reviu keselarasan antara program, indikator kinerja, target, dan alokasi anggaran.
4. Memperkuat koordinasi dan konsultasi dengan tim terkait guna mengantisipasi perubahan kebijakan dan memastikan kualitas dokumen perencanaan.

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta minimal A

Rencana Kegiatan/Aktivitas

1. Review renstra
2. Cascading kinerja sampai level individu
3. Monitoring kinerja melalui rapat manajemen rutin

Progress/Kegiatan

1. Tersusunnya hasil review Renstra sebagai bahan penyempurnaan dokumen perencanaan strategis.
2. Terimplementasinya cascading kinerja hingga level individu
3. Terlaksananya monitoring kinerja secara rutin sehingga perkembangan capaian kinerja dapat terpantau dan dievaluasi secara berkala.

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR E

Kendala/Permasalahan

1. -
2. Pemahaman pegawai terkait penyusunan cascading dan keterkaitan indikator kinerja belum merata.
3. Pengumpulan data dukung capaian kinerja dari beberapa tim kerja belum sepenuhnya tepat waktu

Strategi/Tindak Lanjut

1. Melakukan penyempurnaan Renstra berdasarkan hasil review dan perkembangan kebijakan terbaru.
2. Memberikan pendampingan dan sosialisasi terkait penyusunan cascading kinerja serta pengelolaan SKP.
3. Memperkuat mekanisme monitoring dan pelaporan kinerja melalui penetapan jadwal pelaporan yang lebih terstruktur serta tindak lanjut hasil rapat manajemen.

C. Rekomendasi Pimpinan

1. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian target kinerja organisasi.
2. Memperkuat pendampingan, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan SPMB guna memastikan pelaksanaan berjalan sesuai regulasi, objektif, transparan, dan akuntabel.
3. Melakukan penyelarasan yang lebih kuat antara sasaran kinerja, program, kegiatan, indikator, dan alokasi anggaran untuk meningkatkan efektivitas pencapaian target.
4. Mengoptimalkan ketersediaan data dukung dan eviden kinerja sebagai dasar pengambilan keputusan, pengukuran kinerja, dan pertanggungjawaban organisasi.
5. Memperkuat koordinasi lintas tim kerja serta meningkatkan kapasitas SDM dalam perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja.
6. Melaksanakan revaluasi capaian kinerja dan realisasi anggaran secara berkala sebagai upaya percepatan pencapaian target kinerja, peningkatan Nilai Kinerja Anggaran, dan penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Yogyakarta , 25 Juni 2026

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi D.I. Yogyakarta
	Mohammad Adi Hartono, S.E., M.M

Catatan :

- UU ITE No 1 Tahun 2024 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR